

HUJAN LEBAT MELANDA SLEMAN

9 Rumah Rusak Akibat Longsor dan Angin Kencang

SLEMAN (KR) - Hujan lebat yang melanda Sleman dan sekitarnya, Selasa (11/10) siang menyebabkan 9 rumah rusak ringan hingga berat akibat longsor dan angin kencang. Dalam peristiwa itu, 2 orang mengalami luka ringan dan sempat dilarikan ke RSA UGM. Masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dalam musim hujan ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Makwan STp MT mengatakan, untuk longsor ini terjadi di Karangtanjung, Pandowoharjo, Sleman. Dalam kejadian itu menyebabkan 1 rumah rusak tertimpa material longsor. Kemudian longsor juga terjadi di Menyolan RT/RW 05/03, Sendangmulyo, Minggir, Sleman yang menyebabkan rumah bagian kamar ambrol terbawa longsor.

"Kejadian longsor di Karangtanjung menyebabkan 2 korban luka ringan dan sempat di bawa ke RSA UGM. Kemudian sudah diperbolehkan pu-

lang," kata Makwan, Rabu (12/10).

Selain itu ada juga talut sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter di Sendangarum, Minggir, Sleman ambrol. Longsoran itu menyebabkan menutup akses jalan kampung di Sanan RT 04/RW 14, Sendangarum, Minggir, Sleman. "Akses jalan kampung tertutup, karena material longsor ke jalan," terangnya.

Di samping longsor, hujan kemarin juga mengakibatkan 7 rumah rusak akibat angin kencang. Dengan rincian, rusak ringan 5 rumah, rusak sedang 1 rumah dan rusak berat 1 rumah. Kemudian 3 sepeda



KR-ISTIMEWA

Sepeada motor tertimpa atap akibat gudang roboh.

motor rusak karena tertimpa gudang yang roboh akibat angin kencang.

"Rata-rata, rumah yang rusak ini karena tertimpa pohon yang tumbang. Kemarin petugas BPBD bersama relawan dan warga mengevakuasi pohon yang tumbang. Selain itu juga memberikan bantuan logistik dan terpal untuk menutup atap rumah yang rusak," ujarnya.

Menurutnya, ancaman bencana ini masih akan terjadi karena sekarang ini memasuki musim hujan. Untuk itu, masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaannya.

"Masyarakat harus hati-hati ketika terjadi hujan lebat. Kalau memiliki pohon yang rindang supaya dikurangi rantingnya. Supaya tidak mudah tumbang kalau terkena angin



KR-ISTIMEWA

Bupati Sleman Kustini meninjau lokasi bencana.

kencang," imbaunya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi BPBD Sleman dan Dinsos Sleman, melihat secara langsung kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan usai mendapatkan laporan terjadinya longsor dan menimpa rumah warga, Selasa (11/10) pukul 15.30 WIB setelah diguyur hujan lebat.

"Kami melakukan pe-

ninjauan langsung setelah adanya laporan terjadinya longsor akibat hujan lebat. Saya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," jelas Kustini saat ditemui di lokasi longsor, Rabu (12/10).

Kustini mengungkapkan kondisi rumah warga yang terdampak longsor, mengalami kerusakan berat dan keluarga telah mendapatkan perawatan

dikarenakan mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut.

Lebih lanjut Kustini mengatakan warga Karangtanjung yang menjadi korban longsor mendapat bantuan dari Pemkab Sleman melalui BPBD Sleman sebesar Rp 50.000.000,00 untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan berat.

(Sni/Has)-f

MUDAHKAN AKSES MASYARAKAT

Disdukcapil Miliki Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan



KR-ISTIMEWA

Bupati secara simbolis menyerahkan kerja sama dalam Pelaksanaan Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan.

SLEMAN (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menjalin kerja sama dengan 9 fasilitas kesehatan (Faskes) dan 21 kalurahan untuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan. Program ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Susmiarto mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mening-

katkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Layanan ini didukung dengan kerja sama dari 9 fasilitas kesehatan dan 21 kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman.

"Melalui pos pelayanan dokumen kependudukan, kami berharap masyarakat dapat semakin mudah untuk memenuhi kebutuhannya," kata Susmiarto.

Susmiarto menambahkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman juga mencanangkan

beberapa inovasi, seperti pos pelayanan dokumen kependudukan, program jemput bola dokumen kependudukan terutama bagi masyarakat dengan sakit berat, lanjut usia, penyandang difabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa.

"Dengan inovasi ini tentunya kami bertekad untuk terus meningkatkan cakupan kepentingan kependudukan dan akurasi data. Karena data-data dan dokumentasi kependudukan begitu banyak digunakan instansi untuk berbagai kebutuhan," ujar

Susmiarto.

Sedangkan Bupati Sleman, Kustini dalam sambutan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk memperbaharui layanan dukcapil online sampai pada tahun 2022 ini. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk penambahan jumlah layanan dari 7 layanan menjadi 11 layanan.

"Dengan meningkatnya layanan ini diharapkan dapat menaikkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan," ucap Bupati.

Kustini juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas serta kompetensi aparat dan petugas mitra layanan dalam menggunakan aplikasi dukcapil online. Bupati berharap melalui kegiatan ini, aduan dan hambatan penggunaan layanan administrasi kependudukan dapat diminimalisir.

"Saya berharap dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan pemahaman petugas, standarisasi kerja serta meminimalisir kendala dan aduan dalam layanan administrasi kependudukan," ujar Kustini. (Sni)-f

Kaliurang Belum Miliki Paket Wisata Halal



KR-ISTIMEWA

Pelatihan Desa Wisata Halal Tangguh Bencana di Kaliurang.

SLEMAN (KR) - Wisata halal di Indonesia memiliki potensi besar, mengingat populasi muslim di seluruh dunia mencapai 1,59 miliar jiwa atau 23%. "Khususnya Kaliurang Sleman, mungkin, semua objek wisata di Kaliurang sudah halal, tetapi belum punya paket wisata halal," kata Dr Suyadi MPdI, Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI UAD), saat

Pelatihan Desa Wisata Halal Tangguh Bencana di Wisma Paus, Kaliurang, Selasa (11/10).

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Fian Damasino MSc (Dosen STP Ampta) dengan dimoderatori Dr Anom Wahyu Asmorojati MHum (Dosen Fakultas Hukum UAD). Kegiatan tersebut diadakan UAD menggandeng STP Ampta Yogyakarta bermitra dengan Pimpinan Ranting

Muhammadiyah (PRM) Hargobinangun Pakem Sleman.

Menurut Suyadi, Indonesia pernah meraih peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI). Namun, pada tahun 2022, posisi ini digeser oleh Malaysia. Padahal, negara dengan mayoritas muslim terbesar dunia adalah Indonesia.

Dijelaskan Suyadi, dari segi objek, wisata konvensional bisa saja alam, warisan budaya dan kuliner. Wisata religi hanya membatasi diri pada perjalanan ruhani (umrah, haji, dan ziarah).

Sedangkan wisata halal mencakup keduanya. "Selama terdapat fasilitas ibadah, kuliner halal, aman, bersih dan sehat maka sebuah destinasi dapat disebut sebagai wisata halal," katanya.

(Jay)-f

MASYARAKAT DIIMBAU SEGERA MANFAATKAN

Denda Pajak Kendaraan dan BBNKB Dihapus

SLEMAN (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Oktober hingga 30 November 2022. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau Samsat Sleman E Rully Marsianti SH Mec Dev mengatakan, penghapusan denda atau sanksi administrasi itu berdasarkan Pergub No. 58 Tahun 2022 tentang penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang berlaku 1 Oktober-30 November 2022. Bagi kendaraan yang ada tunggakan pajak, hanya akan dibebankan biaya tunggakan saja.

"Yang perlu dipahami masyarakat, yang dihapus itu denda pajak kendaraan bermotor dan denda bea balik nama. Bukan bea ba-



KR-Saifulah Nur Ichwan

Masyarakat melakukan pengurusan pajak di Samsat Sleman.

lik namanya yang dihapuskan. Bagi kendaraan yang mati lebih dari satu tahun, hanya biaya tunggakan saja yang dibayarkan," jelas Rully kepada KR, Rabu (12/10).

Menurutnya, dengan adanya program tersebut, diharapkan kendaraan yang sudah mati lebih dari dua tahun dapat dihidupkan kembali karena ada penghapusan denda. Selain itu untuk perbaikan data base atau identifikasi kendaraan di Kabupaten

Sleman. Kemudian juga meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor.

"Apalagi nanti kepolisian juga akan memberlakukan aturan penghapusan data kendaraan dengan pajak mati selama dua tahun. Jadi program ini bisa dimanfaatkan agar data kendaraannya tidak dihapus ketika sudah mati lebih dari dua tahun," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada ma-

sarakat yang masih ada tunggakan pajak kendaraan diimbau segera memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Mengingat setelah 30 November 2022 nanti, kemungkinan akan dikenakan denda lagi. "Program ini hanya berlaku dua bulan saja. Saya minta masyarakat yang mempunyai tunggakan, supaya segera bayar pajak kendaraannya agar terbebas denda atau sanksi administrasi," imbaunya.

Disinggung tentang target pajak kendaraan, Rully memaparkan, untuk target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp 366 miliar. Sedangkan untuk target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 184,7 miliar.

"Sampai saat ini untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai 78 persen. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor sudah mencapai 71 persen," paparnya. (Sni)-f



Graduasi PKH : Dorong Penerima PKH Agar Mandiri

PEMERINTAH Kabupaten Sleman telah lama melaksanakan Program Keluarga Harapan atau PKH. Kepesertaannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Telah banyak keluarga yang terbantu dengan adanya PKH.

Sebagaimana lazimnya sebuah program bantuan, tentu diharapkan program tersebut bersifat sementara. Kesementaraan itu mengandung arti tidak selamanya diberikan bantuan. Sifatnya bantuan harus dianggap sebagai stimulan. Dalam hal ini stimulan dengan tujuan untuk suatu saat akan bisa mandiri. Oleh karena itu dalam PKH terdapat program graduasi.

Graduasi PKH adalah berakhirnya kepesertaan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Terdapat dua jenis graduasi PKH. Yang pertama adalah graduasi alamiah, dan yang kedua adalah graduasi mandiri. Jenis pertama, yaitu graduasi alamiah, terjadi pada saat KPM sudah tidak memenuhi lagi kriteria kepesertaan. Misalnya KPM tidak lagi memiliki salah satu komponen kepesertaan yang meliputi Kesehatan, Pendidikan, atau kesejahteraan sosial.

Jenis kedua adalah graduasi mandiri. Graduasi mandiri dapat terjadi apabila kondisi sosial ekonomi KPM sudah meningkat dan dikategorikan mampu. Dengan demikian tidak layak lagi mendapat bantuan sosial PKH. Graduasi Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya.

Berkat dorongan Pendamping Sosial maupun dorongan pihak lain maka KPM bisa secara sadar menolak bantuan karena merasa sudah mampu, atau tidak ingin lagi menggantungkan hidup dari bantuan, atau ingin memberi kesempatan keluarga lain menjadi KPM.

Penolakan bantuan juga bisa terjadi ketika KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi lebih sejahtera. Penyebabnya bisa karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, misalnya diterima sebagai ASN, memiliki usaha yang berkembang, atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama para Pendamping PKH berupaya agar semakin banyak

Danang Maharsa SE



KPM PKH menjadi peserta graduasi mandiri. Langkah yang ditempuh adalah dengan memberi pendampingan usaha ekonomi produktif mereka. Pendampingan dilakukan secara intensif sejak dari pengelolaan usaha, fasilitasi permodalan, pemberian bantuan peralatan, hingga fasilitasi pemasaran.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman telah memiliki data lengkap mengenai jenis usaha KPM PKH. Selain jenis usaha, telah pula didapat data mengenai volume usaha, besarnya pendapatan, kesulitan yang dihadapi, dan ragam bantuan yang diharapkan.

Sejak beberapa waktu yang lalu TKPK Kabupaten Sleman mengupayakan penyediaan sejumlah bantuan peralatan usaha. Salah satu langkahnya adalah menggandeng dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

Harapannya, peningkatan kesejahteraan KPM PKH diikuti dengan tumbuhnya kesadaran untuk menjadi peserta graduasi mandiri. Dengan melepaskan diri dari bantuan pihak lain artinya mereka telah mampu berdiri atas kaki sendiri. Dengan demikian harga diri mereka menjadi benar-benar utuh.

Saya minta para pendamping PKH, para Duku, dan masyarakat dapat berperan aktif mendorong KPM PKH yang sudah mapan secara ekonomi untuk bersedia ikut graduasi. Selanjutnya apabila ada keluarga yang kondisinya lebih memprihatinkan tetapi belum mendapat kesempatan menjadi KPM PKH, maka segera diulaskan.

Saya berharap program-program bantuan sosial di Kabupaten Sleman benar-benar tepat sasaran. Hanya mereka yang memang memenuhi kriteria sajalah yang menjadi penerima manfaat. Mereka yang tidak memenuhi kriteria, jangan memaksa petugas untuk memasukkan nama mereka sebagai penerima manfaat.

Jangan sampai orang yang tidak miskin meminta agar namanya dicantumkan dalam daftar keluarga miskin. Jangan sampai permintaan seperti itu dide-ngar malaikat dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. (f)